

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Iin Sarinah¹, Aan Anwar Sihabudin², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Pangandaran, Indonesia¹

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia²

Universitas Galuh, Tasikmalaya, Indonesia³

e-mail: erlan.tasik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat peninjauan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi Desa*

PENDAHULUAN

Konsep pemberdayaan mulai menjadi pendahuluan yang sudah diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya.

Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan

pelatihan di bidang sosial maupun ketrampilan kepada masyarakat.

Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pangandaran pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian.

Dalam hal ini, konsep dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Pangandaran khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyarakat

yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (need achievement rendah, tidak disiplin).

Rendahnya ketrampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui affirmative action (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan affirmative action bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab XII Pasal 94 disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra

Pemerintah Desa. (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Namun, pada kenyataannya, pemberdayaan yang ada di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepedulian Pemerintah Desa terhadap perekonomian yang ada di masyarakat Desa Pangandaran.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masarakat di bidang ekonomi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh :

1. Pemerintah Desa masih kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakatnya, terutama dalam bidang ekonomi. Contohnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kurang bisa berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, terutam dalam segi ekonomi.
2. Rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat, contohnya, masih banyaknya angka pengangguran di Desa Pangadaran dan kebanyakan dari kalangan generasi muda.

3. Rendahnya tingkat kepedulian dari pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakatnya. Contohnya, pengembangan pemberdayaan ekonomi mikro yang ada di Desa Pangadaran seperti pedagang asongan asin dan pedagang ikan/udang tepung kurang mendapat senruhan dari pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemerintah desa yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, dengan rincian; Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, perangkat desa 3 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Langkah-langkah analisis data adalah

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifikasi*).

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Mas'ood (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah 'Upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat'.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Imran (2008:30) konsep keberdayaan pada dasarnya adalah:

Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional..

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004:80) adalah:

Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan di konsumsi.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- d. Pengembangan usaha produktif;
- e. Penyediaan informasi tepat-guna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ini didasari oleh dimensi dari indikator strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam

Mardikanto dan Soebianto (2017:170), yang terdiri dari:

- a) Pengembangan sumberdaya manusia;
- b) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c) Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- d) Pengembangan usaha produktif;
- e) Penyediaan informasi tepat-guna.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh pemerintah desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

a) Pengembangan Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia untuk indikator pemerintah desa memfasilitasi dalam bentuk pelatihan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan kepada para pelaku usaha.

Selanjutnya indikator mengenai pemerintah desa menyarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbandingan ke luar desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk melakukan perbandingan ke luar desa.

b) Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok untuk indikator Pemerintah Desa membantu dalam pembuatan persyaratan legalitas kelompok usaha dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh adanya beberapa pelaku usaha yang belum membuat persyaratan untuk pembuatan legalitas.

Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Desa memberikan sosialisasi bagaimana caranya dalam pembuatan legalitas kelompok atau organisasi masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha atau masyarakat yang belum paham mengenai cara membuat legalitas usaha atau kelompok.

c) Pemupukan Modal Masyarakat (swasta)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemupukan modal masyarakat (swasta) untuk indikator Pemerintah Desa membantu dalam bentuk permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam segi permodalan.

Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Desa bisa memfasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana usaha masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha atau

masyarakat yang merasa kesulitan mencari tempat atau lahan untuk dijadikan tempat usaha.

d) Pengembangan Usaha Produktif

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan usaha produktif untuk indikator Pemerintah Desa membantu para pelaku usaha atau kelompok untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat website dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki website sebagai alat untuk atau media pengembangan usahanya.

Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Desa memberikan kebebasan kepada setiap pelaku usaha dalam bersaing, harga, ataupun produk yang dihasilkan masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha yang masih kurang profesional dalam persaingan harga ataupun produk yang dihasilkan.

e) Penyediaan Informasi Tepat-Guna

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penyediaan informasi tepat guna untuk indikator Pemerintah Desa memberikan sosialisasi kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan pasar dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai perkembangan usaha.

Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bisa menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila

menemukan kesulitan atau hambatan dalam usahanya masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha yang merasa kebingungan ketika mendapatkan masalah dilapangan terutama permasalahan mengenai usahanya.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya yaitu keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomian yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera menyiapkan semua persyaratan untuk membuat persyaratan legalitas kelompok usaha, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengenai cara pembuatan legalitas kelompok usaha, keterbatasan keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, keterbatasan

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa untuk dialokasikan sebagai tempat untuk dijadikan usaha, keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya serta SDM dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih kurang, masih adanya pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan dagang yang sehat, kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes.

Hasil observasi menunjukan terdapat hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran, diantaranya keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomian yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera menyiapkan semua persyaratan untuk membuat persyaratan legalitas kelompok usaha, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengenai cara pembuatan legalitas kelompok usaha, keterbatasan keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

desa untuk dialokasikan sebagai tempat untuk dijadikan usaha, keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya serta SDM dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih kurang, masih adanya pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan dagang yang sehat, kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes.

Pemberdayaan menurut Mas'ood (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah 'Upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat'.

Menurut Imran (2008:30) konsep keberdayaan pada dasarnya adalah:

Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan teori-teori bahwa sebuah pemberdayaan adalah upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat, menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Timbul Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya yaitu merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha serta pemerintah desa meminta bantuan kepada dinas terkait yang ahli dalam perekonomian untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, melakukan sosialisasi mengenai persyaratan pembuatan legalitas serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas, pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, mengalokasikan dana desa ke Bumdes sesuai aturan yang berlaku, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk bisa digunakan sebagai

tempat usaha, menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya serta meminta bantuan kepada pihak yang lebih mengetahui mengenai penggunaan website, memberikan pemahaman mengenai persaingan usaha yang baik dan tidak merugikan orang lain, menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes serta memberikan pemahaman mengenai Bumdes adalah mitra desa dan bisa dijadikan wadah bagi masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang ekonomi.

Hasil observasi menunjukkan terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran, diantaranya merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha serta pemerintah desa meminta bantuan kepada dinas terkait yang ahli dalam perekonomian untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, melakukan sosialisasi

mengenai persyaratan pembuatan legalitas serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas, pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, mengalokasikan dana desa ke Bumdes sesuai aturan yang berlaku, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk bisa digunakan sebagai tempat usaha, menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya serta meminta bantuan kepada pihak yang lebih mengetahui mengenai penggunaan website, memberikan pemahaman mengenai persaingan usaha yang baik dan tidak merugikan orang lain, menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes serta memberikan pemahaman mengenai Bumdes adalah mitra desa dan bisa dijadikan wadah bagi masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004:80) adalah:

Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan teori-teori di atas bahwa sebuah tujuan pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu-individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan

penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara, belum dilaksanakan dengan optimal, sesuai dengan indikator 5 (lima) program strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:170), hal ini diketahui dari 10 indikator yang diteliti hanya 3 yang dilaksanakan dengan baik dan sisanya 7 indikator belum dilaksanakan dengan baik.

Hambatan-hambatan yang dialami mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Finer, 2006. *Comparative Government*. terjemahan. Ghalia. Indonesia.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hidayat A.A., 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Heath Books
- Hutomo Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko
Soebiato. 2013. Pemberdayaan
Masyarakat. Dalam Perspektif
Kebijakan Publik. Bandung :
Alfabeta. Moleong

_____. 2017 Pemberdayaan
Masyarakat. Dalam Perspektif
Kebijakan Publik. Bandung :
Alfabeta

Miles M dan Huberman. 2007.
Analisis Data Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, 2006. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.
Rosdakarya.

Poerwadarminta, 2006. Kamus Umum
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.

Pranadjaja. 2003. Hubungan Antar
Lembaga Pemerintahan. Alumni.
Bandung

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
13 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa.